

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini memulai penjelasan dengan menunjukkan latar belakang penelitian skripsi ini dilakukan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dijelaskan untuk menggambarkan pokok utama penelitian ini disertai manfaat penelitian. Bab ini kemudian menyajikan di bagian awal beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi. Dilanjutkan dengan menjelaskan kerangka teoritis sebagai alat analisis. Dalam bab ini juga diuraikan kerangka berpikir penelitian ini yang tergambar dalam skema pikir.

1.1. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara demokrasi yang wilayahnya luas dan rakyatnya banyak. Sehingga, demokrasi tidak mungkin dilaksanakan secara langsung. Oleh karena itu, dalam pengertian modern, demokrasi dapat diselenggarakan melalui prinsip perwakilan, sehingga pemerintahan yang terbentuk disebut juga pemerintahan perwakilan atau pemerintahan representatif. Perwakilan tersebut berada di pusat yaitu di DPR RI dan perwakilan yang ada di daerah yaitu di DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Salah satu wujud demokrasi adalah dengan Pemilihan Umum. Dalam kata lain, Pemilu adalah penanggung jawab yang penting dari demokrasi prosedural. Berkaitan dengan ini, Samuel P. Huntington dalam Sahid Gatara menyebutkan bahwa prosedur utama demokrasi adalah pemilihan para pemimpin secara kompetitif oleh rakyat yang bakal mereka pimpin. Selain itu, Pemilu sangat sejalan dengan semangat demokrasi secara substansi atau demokrasi substansial, yakni demokrasi dalam pengertian pemerintah yang diselenggarakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Artinya, rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi.

Pilkada (Pemilihan Langsung Kepala Daerah) artinya pesta demokrasi tahunan tingkat lokal yang dilaksanakan di daerah-daerah tertentu. Kontestasi pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah ialah paket lengkap yang harus dilaksanakan di setiap daerah karena ini merupakan sebuah aturan yang sudah diatur dalam pasal 4 UUD Tahun 1945. Dimana kebebasan masyarakat daerah untuk memilih pemimpin yang akan memimpin wilayahnya sendiri akan di tentukan melalui mekanisme pemilihan langsung, maka pilkada dapat di artikan sebagai penyelenggaraan kedaulatan rakyat pada Provinsi maupun Kabupaten/Kota bagi pemimpin daerah yakni Gubernur, Bupati serta Walikota dengan langsung serta demokratis yang di selenggarakan oleh lembaga-lembaga yang bertugas, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) serta Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP).

Setiap individu masyarakat berhak mencalonkan diri sebagai kontestan pada Pilkada dengan syarat dan ketentuan yang sudah diatur oleh penyelenggara

Pemilihan Umum seperti, dimana calon gubernur harus diusulkan oleh beberapa partai, koalisi, maupun perseorangan kemudian mendaftarkan atau didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum yang akan menjadi kompetisi politik tersebut.

Budaya ataupun kebudayaan memiliki lingkup yang begitu luas, yang mana meliputi tindakan, pola berpikir, peralatan, maupun sikap. Sedangkan, politik berhubungan terhadap kebijakan maupun pemerintah. Sehingga, kebudayaan politik bisa bermakna suatu pola berpikir, perilaku, sikap, serta peralatan masyarakat pada penyelenggaraan administrasi negara, adat istiadat, hukum, politik pemerintah, dan norma kebiasaan dari masyarakat. Asal mula atau lahirnya suatu budaya politik pada dasarnya berasal dari lingkungan sekitar masyarakat. Hal itu karena masyarakatlah yang memiliki hak atau wewenang dalam membuat suatu kebijakan dan mengambil keputusan. Perlu diketahui bahwa suatu budaya politik yang ada dalam suatu negara akan mengalami sebuah perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu.

Dari segi metodologinya Teori Budaya Politik adalah suatu wujud teori yang dilakukan pengembangan, guna pemahaman suatu sistem politik. Budaya politik bisa dimengerti merupakan sikap orientasi yang khas masyarakat negara kepada sistem perpolitikan serta berbagai bagian, maupun sikap kepada peran masyarakat yang terdapat pada sistem tersebut. Istilah lainnya, bagaimanakah pendistribusian berbagai pola orientasi khususnya menuju tujuan perpolitikan diantara warga negara tersebut.

Budaya politik tidak terlepas dari perilaku politik masyarakat serta dinamika politik yang sedang berlangsung di Indonesia, khususnya dalam skala lokal. Pengkajian tentang perilaku politik yang merupakan bagian terpenting sebenarnya juga dapat dilihat dari kekentalan budaya politik pada masyarakat, sejauh mana budaya politik itu mempengaruhi perilaku seseorang maka sejauh itu perilaku masyarakat mengikat secara keseluruhan. Dalam konteks politik lokal, terdapat beberapa budaya politik yang dapat kita temui di tengah masyarakat. Salah satu contohnya adalah masyarakat hukum adat.

Masyarakat Hukum Adat (MHA) merupakan salah satu subjek hukum negara yang diakui dalam UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan. Sebagaimana pada Pasal 18B ayat 2 mengatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kajang merupakan salah satu daerah yang berada di kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada Kecamatan Kajang terdiri dari

berbagai desa, salah satunya ialah desa Tanah Toa, yang mana masyarakat yang berkediaman secara turun-temurun di Desa Tanah Toa tersebut telah diakui keberadaannya secara hukum adat. Desa Tanah Toa yang merupakan kawasan masyarakat adat di mana desa Tanah Toa terbagi menjadi 8 (delapan) dusun yaitu Dusun Balagana, Jannayya, Sobbu, Pangi, Bongkina, Benteng, Tombolo, Lurayya, dan Balambina.

Masyarakat adat kajang yang di ketahui sangat terikat oleh hukum adat dan membatasi diri mereka dari masyarakat luar. Tentunya terdapat beberapa perbedaan dalam budaya politik antara masyarakat adat dan masyarakat pada umumnya seperti yang di ketahui masyarakat adat kajang masih memegang teguh adat istiadat yang secara langsung mempengaruhi perilaku memilih mereka.

Perilaku memilih masyarakat adat kajang cenderung memiliki kriteria tersendiri mengenai sosok pemimpin atau wakil rakyat yang akan mereka pilih, walaupun pada dasarnya setiap orang mempunyai kriteria tersendiri dalam memilih seorang pemimpin. Namun, dalam konteks masyarakat adat mereka memiliki sistem tersendiri di mana mereka memiliki pemangku adat yang mereka ikuti dan hormati hal ini menjadi menarik di mana pada saat pemilihan umum mereka juga harus mendengarkan apa yang dikatakan oleh pemangku adat atau yang biasa disebut dengan Ammattoa. Di mana apakah dalam pemilihan umum ketua adat/pemangku adat mempunyai pengaruh besar dalam memobilisasi masyarakatnya dalam memilih salah satu calon.

Budaya politik yang di miliki oleh masyarakat adat kajang yang cukup berbeda dari masyarakat pada umumnya hal itulah menjadikan konsep Budaya Politik sangat memungkinkan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pilihan masyarakat adat kajang dalam memberikan dukungan politik pada pemilihan kepada daerah. Oleh karena itu saya sebagai peneliti tertarik untuk menarik meneliti penelitian yang berjudul **“BUDAYA POLITIK MASYARAKAT ADAT AMMATOA KABUPATEN BULUKUMBA PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2020”**.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah : Bagaimana bentuk budaya politik masyarakat adat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk : Menjelaskan bentuk budaya politik masyarakat adat Ammatoa di Kabupaten Bulukumba.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang budaya politik masyarakat adat.
2. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pemikiran, kontribusi, dan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan masyarakat luas mengenai budaya politik masyarakat adat dalam pemilihan kepala daerah.

1.5. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti dalam melakukan penelitian dan juga untuk menghindari penelitian yang sama dalam satu objek. Penulis berpacu pada beberapa penelitian dan melakukan telaah pustaka yakni terkait masalah apa saja yang akan diangkat, teori, metode penelitian yang digunakan serta hasil penelitian yang ditemukan. Selain itu, penulis juga akan memaparkan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian terdahulu. Berikut penelitian terdahulu yang telah ditelaah oleh penulis.

1. Ayu Lastari, Skripsi: Budaya Politik Masyarakat Kampung Arab AlMunawar 13 Ulu Palembang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Masyarakat Kampung Arab Al-Munawar berorientasi politik yang cenderung tinggi kepada sistem perpolitikan dengan umum. Dan pula memberi perhatiannya yang cukup besar kepada politik namun bersifat pasif. Meskipun mereka kebanyakan Islam tapi pada pemilu sama sekali tidak ada afiliasi di partai Islam, mereka melakukan pemilihan yang selaras terhadap tingkatan pengetahuan maupun nalurinya. Dan beropini yaitu Partai Nasionalis lebih ada kepedulian kepada kepentingan masyarakatnya. Kebudayaan politik warga Kampung Arab Al-Munawar diklasifikasikan pada jenis Budaya Politik Subjek serta Partisipan karena memiliki ciri-ciri Budaya Politik Subjek/Kaula dan Partisipan itu sendiri.
2. Arsiandi Dian Hapizin, Syafrudin, M. Mabur Haslan, Skripsi: Budaya Politik Masyarakat Suku Sasak Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Secara Langsung. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Warga Desa Pringgajurang adalah warga yang berciri budaya politiknya subjek atau kaula. Hal itu bisa diamati melalui kecondongan sikap serta orientasi

poliknya warga Desa Pringgajurang sifatnya afektif (perasaan) yang mana pada saat penentuan pilihan politiknya pada pemilukada tahun 2013 kemarin, yang mana masyarakat Desa Pringgajurang sebagian besar memilih berdasarkan faktor perasaan atau afektif. Budaya politik partisipan terlihat dari tingkatan partisipasinya warga saat pemilukada dengan langsung di Kabupaten Lombok Timur telah cukup tinggi, yang mana warga telah mempunyai kesadaran agar turut ikut melaksanakan pencoblosan pada saat pemilukada tahun 2013 kemarin tanpa paksaan dari orang lain. Partisipannya disini adalah partisipan pasif, karena warga turut mencoblos karena ingin melakukan pemilihan salah satunya dari pasangan yang diusung oleh salah satu organisasi keagamaan yakni NW.

3. Adi Sucipto, Skripsi: Budaya Politik Lokal Dan Partisipasi Politik Masyarakat di Desa Sumber Sari Kecamatan Sebulu Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Budaya politik lokal kepada tingkatan partisipasi politik warga pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif tahun 2014, yang mana warga yang diklasifikasikan pada masyarakat yang mempunyai budaya politik partisipannya masih bisa diberi pengaruh dari individu lainnya, sementara warga yang digolongkan pada warga dengan yang mempunyai budaya politik parokial justru lebih sifatnya otonom (didasarkan atas kesadaran dirinya sendiri) dan tidak diberi pengaruh orang lain.
4. Ahmad Robi Ulzikri, Roby Cahyadi Kurniawan dan Himawan Indrajat, Skripsi: Budaya Politik Warga Nahdlatul Ulama Kota Bandar Lampung: Belajar dari Pencalonan Ma'ruf Amin dalam Pemilihan Umum 2019. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, kebudayaan politik Warga NU struktural ataupun pengurus NU Bandar Lampung yakni bertipe budaya politik Partisipan, dikarenakan mempunyai komponen pengetahuan, perasaan, maupun penilaiannya yang baik kepada seluruh komponen di politik yakni sistem selaku objek umum, beragam objek input-nya, beragam objek output-nya, maupun pribadi yang merupakan objek pada sistem dalam Pilpres tahun 2019. Kedua, kebudayaan politik warga NU lingkup kultural yakni santri beserta kiai pondok pesantren NU di Bandar Lampung bertipe budaya politiknya peralihan ataupun transisi dari kebudayaan politik subjek menuju partisipan. Hal itu karena kelompok itu mempunyai evaluasi yang baik kepada beragam objek input, tapi masih ada kekurangan khususnya pada partisipasi individu. Kiai dan santri biasanya berpengetahuan terkait keadaan politik terutama kontestasi pemilihan umum. Kiai berperan sentral pada kaitan mentransfer pemahaman serta ilmunya terhadap para santri. Kuasa atas intelektualitas itu mendukung kiai mempunyai peranan strategis untuk menciptakan sikap politik para santrinya, namun sikap

teladan individu ialah yang jadi faktor kuat di mana santri bisa ikut pada sesuatu yang jadi sikap guru atau kiainya, meski tanpa adanya mobilisasi.

Perbedaan dari beberapa penelitian-penelitian diatas dengan peneliti secara umum dapat dilihat dari subjek penelitian, objek penelitian serta tempat penelitiannya. Selain itu, kegiatan meneliti ini memiliki kesamaan pada penggunaan teori budaya politik Gabriel Almond dan Sidney. Penelitian ini memberikan dukungan serta memperkuat penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang budaya politik.

1.6. Budaya Politik

Budaya politik merupakan pola perilaku individu dan orientasinya dalam kehidupan bernegara, penyelenggaraan administrasi negara, politik pemerintahan, hukum, adat istiadat, dan norma kebiasaan yang dihayati oleh seluruh anggota masyarakat setiap harinya. Budaya politik juga dapat diartikan sebagai suatu sistem nilai bersama suatu masyarakat yang memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya. Definisi budaya politik menurut Verba budaya politik, menunjuk pada sistem kepercayaan-kepercayaan tentang pola-pola interaksi politik dan institusi-institusi politik.

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba mengaitkan budaya politik dengan orientasi dan sikap politik seseorang terhadap sistem politik dan bagian- bagiannya yang lain serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem politik. Gabriel A. Almond dan Sidney Verba melihat bahwa dalam pandangan tentang objek politik, terdapat tiga komponen yaitu: Komponen Kognitif, yaitu kemampuan yang menyangkut tingkat pengetahuan dan pemahaman serta kepercayaan dan keyakinan masyarakat terhadap jalannya sistem politik dan atributnya, seperti tokoh-tokoh pemerintahan, kebijaksanaan yang mereka ambil, atau mengenai simbol-simbol yang dimiliki oleh sistem politiknya, Komponen afektif berupa perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor, dan penampilannya, dan Komponen Evaluatif berupa keputusan dan pendapat tentang objek-objek yang secara tipikal melibatkan standar nilai dan kriteria Informasi dan perasaan. Gabriel Almond dan Sidney Verba juga menegaskan bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologis dalam suatu sistem politik, hal ini terjadi karena budaya politik menjadi satu lingkungan psikologis bagi terselenggaranya konflik-konflik politik (dinamika politik) dan terjadinya proses pembuatan kebijakan politik.

Budaya politik suatu masyarakat dengan sendirinya berkembang di dalam dan dipengaruhi oleh kompleks nilai yang ada dalam masyarakat tersebut. Hal ini terjadi, karena kehidupan masyarakat dipenuhi oleh interaksi antar-orientasi dan

antar-nilai. Interaksi yang demikian memungkinkan timbulnya kelompok antar budaya, dan menjadi pemicu dalam menjalin proses integrasi dan pengembangan budaya politik.

Gabriel A. Almond dan Sidney Verba membagi Tipologi budaya politik dalam tiga jenis, yakni budaya politik parokial, budaya politik kaula atau subjek dan budaya politik partisipan. Yang penting dari klasifikasi tersebut adalah kepada objek politik apa aktor politik individual berorientasi, bagaimana mereka mengorientasikan diri, dan apakah objek-objek politik tersebut terlibat secara mendalam di dalam pembuatan kebijaksanaan atau di dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Hasilnya adalah beberapa jenis tiga tipe ideal budaya politik berikut:

1. Budaya politik parokial

Lingkup masyarakat yang mana dibatasi dalam daerah ataupun lingkup yang tidak luas atau kecil seperti yang sifatnya provinsial. Dalam masyarakat tradisional dan sederhana di mana spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering kompak dengan melakukan peranannya dalam bidang ekonomi, keagamaan, dan lainnya. Dalam masyarakat yang bersifat parokial ini, karena terbatasnya diferensiasi tidak terdapat peranan politik yang bersifat khas dan berdiri sendiri, sebagai contoh pemimpin suku (*tribe*), yang sekaligus mengemban berbagai peranan dalam masyarakatnya.

Pada kebudayaan seperti ini, anggota masyarakat cenderung tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik yang luas, kecuali dalam batas tertentu, yaitu terhadap tempat di mana ia terikat secara sempit. Keadaan yang mutlak, di mana anggota masyarakat tidak menaruh minat terhadap objek-objek politik secara sepenuhnya, kecuali terhadap objek-objek dalam skala yang kecil sekali, memang tidak akan pernah ada. Yang nyata-nyata menonjol dalam budaya politik parokial ialah adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan/kekuasaan politik dalam masyarakatnya. Dalam masyarakat dapat dikategorikan sebagai budaya politik parokial apabila orientasinya tidak terlihat terhadap sistem politik secara keseluruhan terhadap input maupun output serta terhadap diri sendiri sebagai elit politik. Adapun ciri – ciri budaya politik parokial yaitu apatis, ruang lingkungannya sempit dan kecil, pengetahuan masyarakat akan politik rendah, masyarakatnya yang cenderung sederhana dan tradisional, adanya ketidakpedulian dan juga penarikan diri dari kehidupan politik, anggota masyarakat condong tidak berminat terhadap objek politik yang luas, kesadaran mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakat rendah, tidak ada peranan politik bersifat khusus, warga negara tidak sering terlibat dalam sistem politik.

Pada akhirnya masyarakat pun mempercayakan pilihan politiknya kepada seorang tokoh masyarakat seperti kiai dan kepala desa yang mana memiliki pengaruh kuat di dalam lingkungan suatu masyarakat. Itulah sebabnya masyarakat cenderung apatis terhadap politik serta kesadaran akan politik rendah.

2. Budaya politik kaula

Budaya politik subjek/kaula merupakan budaya politik yang mana anggota masyarakat mempunyai minat, perhatian, juga memiliki kesadaran terhadap sistem sebagai keseluruhan, terutama terhadap segi output-nya. Perhatian yang frekuensinya sangat rendah atas aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol. Orientasi mereka yang nyata terhadap objek politik dapat terlihat dari pernyataannya, baik berupa kebangsaan, ungkapan sikap mendukung maupun sikap bermusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek output-nya. Posisinya sebagai kaula, pada pokoknya dapat dikatakan posisi yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau mengubah sistem, dan karena itu menyerah saja kepada segala kebijakan dan keputusan para pemegang jabatan dalam masyarakatnya. Segala keputusan (dalam arti output) yang diambil oleh pemeran politik (dalam arti memangku jabatan politik) dianggapnya sebagai sesuatu yang tak dapat diubah, dikoreksi apalagi ditantang. Tiada jalan lain baginya kecuali menerima saja sistem sebagai apa adanya, patuh, setia, dan mengikuti segala instruksi dan anjuran para pemimpin (politik)-nya.

Apabila jika frekuensi orientasi terhadap sistem politik dan terhadap output itu sangat tinggi, manakala orientasi terhadap objek input dan terhadap diri sendiri sebagai aktor politik sangat rendah, maka budaya politik seperti ini disebut sebagai subjek. Artinya bahwa, hubungan mereka terhadap suatu keputusan dan sistem sebagai keseluruhan pada dasarnya adalah bersifat pasif. Jenis budaya politik ini kemungkinan besar wujud dalam masyarakat yang tidak mempunyai struktur input yang dibedakan. Orientasi subjek dalam sistem politik yang telah mengembangkan lembaga-lembaga demokrasi lebih cenderung bersifat subjektif dan normatif daripada bersifat kognitif.

Menurut pandangan mereka, masyarakat mempunyai struktur, di mana perorangan ataupun kelompok sudah diguratkan menerima saja keadaan dan harus puas menerima "kodrat"-nya. Tingkat kepatuhan dalam budaya politik seperti ini sangat intens, seseorang hanya berfungsi sebagai "kaula" (onderdaan). Jika ia tidak menyukai sistem dan output, itu disimpannya saja dalam sanubari. Sikap pun juga demikian mungkin tidak dimanifestasikan secara terang-terangan, karena memang tidak adanya sarana/kapasitas untuk mengubah atau melawan. Budaya politik seperti ini merupakan hasil dari sebuah "bentukan" keadaan tertentu. Perlu kiranya dipertimbangkan untuk ditelaah, misalnya pengaruh status koloni,

penjajahan, dan corak diktator/ otoriter terhadap budaya politik kaula ini. Dalam hal ini, sikap anggota masyarakat yang pasif bukan berarti secara potensial dapat diabaikan.

Adapun ciri-ciri budaya politik kaula yaitu ditandai dengan pemahaman yang sama sebagai warga negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara yang lebih pasif. Mereka tetap ikut pada berbagai berita politik, namun tidak bangga kepada sistem politik negaranya serta peran komitmen emosionalnya rendah kepada negara. Dalam arti, secara emosional mereka tidak merasakan ada keterlibatan dengan negaranya. Mereka merasakan ketidaknyamanan jika memperbincangkan permasalahan perpolitikan. Mereka taat terhadap pejabat pemerintah maupun UU, namun tidak ada keterlibatan dirinya pada politik dan juga memberi suara saat pemilu. Sehingga, mereka tidak percaya orang lain dengan mudah. Di ujung yang lainnya, ketika berhadapan bersama institusi negara mereka merasa lemah dan tidak bisa berbuat apa-apa selain pasrah.

3. Budaya politik partisipan

Budaya politik yang dicirikan melalui terdapatnya tindakan individu yang mengasumsikan diri sendirinya atau orang lain merupakan anggota aktif pada dunia politik. Individu secara mandiri sadar akan tiap hak dan tanggungjawabnya (kewajibannya) serta dapat pula merelaisasikan dan mempergunakan hak dan menanggung kewajibannya. Tidak diharapkan seseorang harus menerima begitu saja keadaan, berdisiplin mati, tunduk terhadap keadaan, tidak lain karena ia merupakan salah satu mata rantai aktif proses politik. Dengan demikian, seseorang dalam budaya politik partisipan dapat menilai dengan penuh kesadaran, baik sistem sebagai totalitas, input dan output maupun posisi dirinya sendiri. Oleh karena tercakupnya aliran input dan aliran output, ia sendiri terlibat dalam proses politik sistem politik tertentu, betapa pun kecilnya. Selain itu, pola sikap serta orientasi anggota masyarakatnya yang cenderung secara jelas berorientasikan sistem politik secara keseluruhan terhadap objek dan proses input, objek dan proses output, dan diri sendiri sebagai aktivis dalam proses politik.

Adapun ciri-ciri budaya politik partisipan warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya, tidak begitu saja menerima kebijakan politik tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran, warga dapat menolak menurut penilaiannya sendiri, serta menjadi warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. Lalu, warga merasa bebas dan berani mendiskusikan masalah politik. Mereka merasa pada tingkatan tertentu, dapat memberi pengaruh jalannya perpolitikan negara. Mereka juga merasakan ada kebebasan serta bisa melakukan pendirian organisasi politik

baik untuk melakukan protes atau memberi dukungan pemerintahan. Apabila tidak melakukan pendirian organisasi politik, mereka pun banyak bergabung pada organisasi sukarela dengan sifat politik dan juga tidak. Ketika pemilu mereka cukup berbangga hati.

1.7. Perilaku Pemilih

Firmanzah (2012), Pemilih merupakan semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan. Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat pada umumnya. Konstituen adalah sekelompok masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti parpol.

Sementara perilaku memilih menurut Surbakti adalah “aktifitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih dan tidak memilih (to vote or no to vote) di dalam suatu pemilu maka voters akan memilih atau mendukung kandidat tertentu”. Perilaku memilih ini di tentukan oleh tujuh domain kognitif yang berbeda dan terpisah.

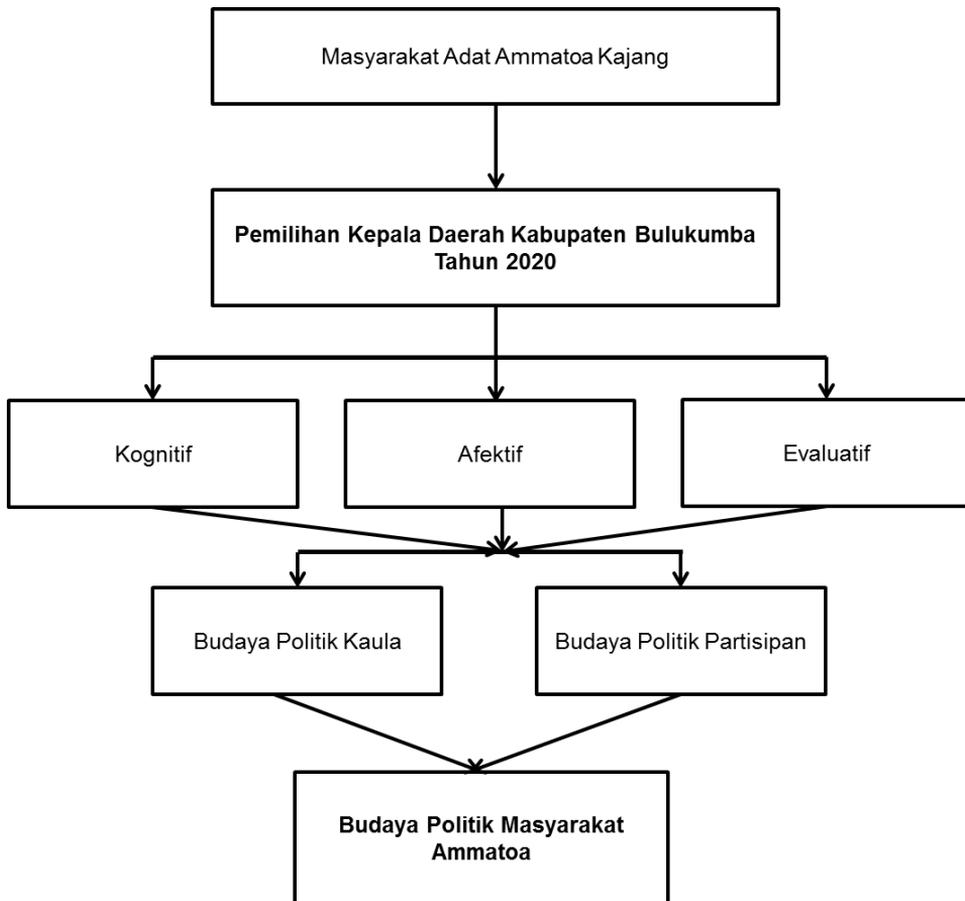
1. Isu dan kebijakan politik (issues and policies), mempersentasikan/ program (platform) yang di perjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika kelak menang pemilu.
2. Citra sosial (social imagery), menunjukkan stereotip kandidat atau partai untuk menarik pemilih dengan menciptakan assosiasi antara kandidat atau partai dan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat. Citra sosial bisa terjadi berdasarkan banyak faktor, antara lain demografis, sosial ekonomi, kultur, dan etnik, serta politis ideologis.
3. Perasaan emosional (emotional feelings) adalah dimensi yang terpancar dari sebuah kontestan atau kandidat yang di tunjukkan oleh kebijakan politik yang di tawarkan.
4. Citra kandidat (candidate personality) mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting dan dianggap sebagai karakter kandidat.
5. Peristiwa mutakhir (currents events), mengacu pada peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selamakampanye.
6. Peristiwa personal (personl event), mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat, misalnya skandal seksual, skandal bisnis, menjadi korban rezim tertentu, menjadi tokoh perjuangan, ikut berperang, dan sebagainya.
7. Faktor-faktor efisdemik (episdemic issues) adalah isu-isu pemilihan yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih mengenai hal baru.

Referensi pemilih seringkali terbentuk lebih dari satu faktor yang satu dengan yang lain saling meneguhkan. Kombinasi dari beberapa faktor dapat membentuk sebuah citra tertentu dalam benak pemilih.

1.8. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir ini disusun sebagai landasan penelitian yaitu untuk menguji teori mengenai budaya politik dan perilaku mereka terhadap pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di kabupaten Bulukumba tahun 2020. Dalam konteks masyarakat adat yang masih memegang teguh adat istiadat, tentunya ketua adat/pemangkuh adat juga mempunyai pengaruh besar dalam memobilisasi masyarakatnya memilih salah satu calon. Masyarakat adat menganggap bahwa perintah pemangkuh adat adalah mutlak dan harus di patuhi. Tetapi seiring berjalannya waktu, masyarakat adat dalam kehidupan sosial politik tidak sepenuhnya lagi patuh terhadap pemimpin adat. Mereka hanya patuh dalam bidang-bidang tertentu misalnya bidang spiritual dan keagamaan. Budaya Politik mempengaruhi perilaku mereka dalam menentukan sebuah pilihan. Dengan menggunakan teori budaya politik, penulis melihat budaya politik kaula dan budaya politik partisipan terbentuk pada masyarakat adat Ammatoa Kajang.

1.9. Skema Berpikir



BAB II

METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, subjek penelitian, dan teknik analisis data.

2.1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif deskriptif. Metode penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yaitu sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini berpengaruh pada Informan secara utuh. Makna dari penelitian deskriptif sendiri merupakan suatu metodologi untuk menganalisis suatu keadaan atau kejadian yang telah ditentukan dan hasilnya akan dipaparkan dalam suatu bentuk laporan penelitian.

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa penelitian jenis kualitatif ini memaparkan data-data yang diperoleh oleh peneliti melalui informan dan sumber data pendukung secara proposional dan menyeluruh sehingga hasil yang didapatkan benar-benar objektif dan apa adanya. Dapat dikatakan bahwa metode kualitatif menelaah bagaimana mendekati persoalan secara fenomenologi yang artinya bagaimana cara mengumpulkan data dalam bentuk kata-kata (lisan dan tulis) ucapan dan isyarat, pengalaman dan perilaku yang dapat diamati.

Kemudian pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, yaitu suatu proses menganalisa, menjelaskan, serta menjabarkan data dan informasi yang diperoleh ke dalam bentuk untuk dipahami dan dalam bentuk deskriptif atau penjelasan. Dikarenakan dalam proses penelitian ini memperoleh data primernya menggunakan data yang bersifat verbal yakni berupa gambaran-gambaran yang diperoleh dari hasil di lapangan. Selain itu, pendekatan kualitatif digunakan karena adanya beberapa pertimbangan yang pertama, penyesuaian pendekatan kualitatif terkesan lebih mudah dihadapkan pada suatu realitanya. Kedua, pendekatan ini menyajikan secara langsung kenyataan yang sebenar-benarnya. Ketiga, pendekatan ini lebih peka dan lebih bisa menyesuaikan diri dengan banyaknya pengaruh akan pola nilai yang sedang dihadapi.

2.2. Lokasi Penelitian

Pemilihan lokasi tepat sangatlah penting dalam melakukan penelitian yang sangat mendalam agar mendapatkan data yang terpercaya dan apa adanya untuk memecahkan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini dilakukan di desa Tana Towa kecamatan kajang kabupaten Bulukumba. Peneliti melakukan penelitian di tempat ini karena Desa Tanah Toa yang merupakan kawasan masyarakat adat

Secara geografis dan administratif, terdiri dari sembilan dusun, tersisa tujuh dusun yang masih terikat aturan adat.

2.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat memberikan dampak untuk temuan yang didapat ketika melaksanakan penelitian. Pengumpulan data bisa dilakukan melalui beberapa macam cara yang disesuaikan oleh kebutuhan penelitiannya. Tahapan Penelitian yang diteliti oleh penulis harus terstruktur dan memiliki cara agar mendapat informasi yang akurat dan baik serta terstruktur dari setiap jawaban yang ada pada rumusan masalah yang akan diteliti, keakuratan informan. yang mana nantinya akan digali mengenai data yang akan dipertanggungjawabkan oleh penulis. Berikut teknik-teknik pengumpulan data pada penelitian ini :

a. Wawancara

Wawancara merupakan sebuah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara bertanya secara langsung kepada pihak yang bersangkutan. Tahapan wawancara merupakan tahapan interaksi dan komunikasi dalam pengambilan data untuk menjawab Rumusan masalah yang ada pada suatu penelitian. Wawancara terbagi menjadi dua yakni wawancara tidak berstruktur dan wawancara berstruktur perbedaan kedua jenis model wawancara ini terletak pada ketika menemui informan dimana kalau wawancara berstruktur pewawancara sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyai ke informan.⁵⁷ Penelitian ini menggunakan model wawancara yang berstruktur. Instrumen wawancara berstruktur yang digunakan oleh peneliti diantaranya adalah buku catatan sebagai pedoman untuk wawancara, alat tulis, alat tulis untuk catatan di lapangan dan kamera serta alat recorder untuk merekam segala bentuk pembicaraan yang telah dilakukan.

b. Dokumentasi

Salah satu cara untuk mendapatkan sumber data dari informan adalah dengan cara dokumentasi. Sumber data berupa dokumentasi sangatlah dibutuhkan untuk mendapatkan atau melengkapi dan memperkuat sumber data yang ada. Dengan studi dokumentasi pengumpulan data dapat dilakukan dengan mencari dokumen atau data yang berkaitan dengan fokus peneliti, baik data yang didapatkan berupa laporan tertulis ataupun laporan tidak tertulis. Juga data yang didapat dari media yang ada. Dokumentasi merupakan suatu metode pengumpulan data yang digunakan sebagai sarana untuk mencari serta meningkatkan referensi data atau informasi yang berkaitan dengan kajian penelitian dalam data sekunder. Adapun dokumen yang digunakan berupa buku, artikel, skripsi, jurnal melalui internet, koran, foto dan lain- lain. Berbagai dokumen data yang diperoleh perlu

diseleksi terlebih dahulu secara baik dan bijak agar sesuai dengan kajian penelitian yang dilakukan. Jadi, alat bantu yang digunakan peneliti berupa kamera, alat recorder untuk merekam segala bentuk pembicaraan yang telah dilakukan.

2.4. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini tentunya membutuhkan informan agar menguatkan hasil penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini yakni :

No	Informan	Status Informan
1.	Zulkarnain, S,Pd.	Kepala desa tanah toa
2.	Muhammad Abbas, S,Sos	Sekretaris Desa
3.	Sainuddin	Kaur Umum Desa
4.	Puto Toba	Pemangku Adat
5.	Puto bolong	Tokoh Masyarakat
6.	Uddin	Tokoh Masyarakat
7.	Bato	Masyarakat
8.	Aso	Masyarakat
9.	Arman Alfiandi	Pemuda Desa
10.	Ratu	Masyarakat

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses kegiatan menyusun, melakukan suatu urutan secara sistematis dan manipulatif serta menyederhanakan data yang diperoleh sehingga mudah dipahami. Melalui analisa kualitatif, data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif yaitu menganalisa data yang diperoleh, kemudian menggunakan teori-teori yang diberikan dengan data tersebut guna memecahkan permasalahan yang ada pada pokok kajian dalam penelitian ini. Dalam upaya menganalisis data, Miles dan Habermas memberikan pandangannya bahwa ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan salah satu proses seleksi data yang berfokus pada penyederhanaan. Pada tahap ini akan terfokuskan pada data yang diperoleh dari lapangan. Data lapangan itu, kemudian di seleksi untuk mengetahui relevansinya terhadap pokok kajian dalam penelitian. Berbagai data yang telah diseleksi, disederhanakan, dikelompokkan serta dijabarkan atas dasar tema untuk merekomendasikan data tambahan. Kemudian hasilnya akan dipaparkan secara singkat dan jelas dalam bentuk ringkasan.

b. Tahap penyajian data (display data)

Penyajian data ini dilakukan secara deskriptif guna mengetahui gambaran masalah secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dalam penelitian yang diteliti. Pada tahapan ini penyajian data disajikan terlebih dahulu dalam bentuk teks naratif. Hasil teks naratif tersebut disederhanakan dalam bentuk uraian yang nantinya akan mendeskripsikan bagaimana alur proses hasil temuan berdasarkan susunan yang nantinya akan mendeskripsikan alur proses hasil temuan berdasarkan susunan yang telah disesuaikan dalam uraian tersebut.

c. Kesimpulan

Tahap ini merupakan proses mengungkapkan makna hasil penelitian yang diekspresikan dalam sebuah teks naratif yang jelas, ringkas, serta mudah dipahami. Pada tahapan ini hasil penelitian tersebut harus sesuai dengan uji kebenaran dari setiap makna yang muncul pada data penelitian. Hal ini dilakukan dengan cara berulang kali guna mengetahui kebenaran kesimpulan terutama dalam hal relevansi dan konsistensi kesimpulan dengan pokok kajian penelitian.